

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia, maka dengan melalui amandemen UUD 1945, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal itu mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi itu diadakan supaya para penyelenggara negara mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hukum sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan. Negara hukum, konstitusi, dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan menuju sebuah bangunan negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan kepada hukum.<sup>1</sup>

Dalam konsep negara hukum, pilihan penyelesaian melalui demonstrasi bukanlah pilihan yang tepat. Demonstrasi yang berujung pada sikap anarkis menunjukkan bahwa ada ketidakmauan untuk mentaati hukum dan ketidakmampuan berpikir secara rasional.<sup>2</sup>

Dalam proses penyelesaian masalah pada Negara hukum seharusnya dapat di selesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk perkara perdata lazimnya penyelesaian perkara diutamakan melalui jalur non litigasi (penyelesaian perkara di luar persidangan) hal ini dikarenakan perdata merupakan masalah privat sehingga penyelesaian bisa dilakukan dengan cara negosiasi<sup>3</sup>, mediasi<sup>4</sup>, maupun arbitrase<sup>5</sup>. Sedangkan penyelesaian perkara pidana lazimnya diselesaikan melalui jalur *litigasi* yaitu penyelesaian sengketa atau perkara melalui jalur pengadilan.

Adapun penyelesaian perkara di Pengadilan ini meliputi berbagai tahapan. Diantara tahapan-tahapan tersebut yang paling penting merupakan tahap

---

<sup>1</sup>A **Salman Maggalatung**, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*, erdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id>. Access 14 februari 2017

<sup>2</sup>Tomy Michae, *Hormati Penyelesaian Kasus Ahok Secara Hukum*, terdapat dalam <http://beritajatim.com>, access 14 Februari 2017

<sup>3</sup> cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan

<sup>4</sup> cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak

<sup>5</sup> cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter

pembuktian di dalam persidangan. Pembuktian ini sudah menjadi masalah hukum, demikian yang sering dikatakan orang. Oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana, bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh<sup>7</sup>

Mernurut KuhaP<sup>8</sup> terutama pada bagian keempat Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada pasal 184 disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi<sup>9</sup> adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 185 KUHAP. Mengenai tata cara kesaksian hal ini sudah di jelaskan pada pasal sebelumnya yaitu pasal 159 KUHAP yang berisi:

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, S.H., 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal. 14

<sup>7</sup> Kukuh Tirta S. *Pembuktian Perkara Pidana, (Definisi dan Klasifikasi Alat Bukti)*, terdapat dalam <http://kukuhtirtas.blogspot.co.id>, access 14 februari 2017

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>9</sup> Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

1. Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di sidang
2. Dalam Hal saksi tidak hadir, meskipun telah di panggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut di hadapkan di persidangan.

Dari Ketentuan pasal tersebut memang masih belum dapat di maknai secara lugas oleh karena itu perlu kita telaah maksud pasal tersebut dari Penjelasan pasal 159 tersebut. Dalam penjelasan pasal 159 ayat (1) dijelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Merujuk pada pasal selanjutnya maka penjelasan dari pasal 159 ayat (1) ini sangat berkaitan. Pada pasal 160 cara pemanggilan saksi di persidangan dijelaskan dengan lebih kongkrit yakni “saksi di panggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat umum”.

Dari peraturan KUHAP pasal 159 dan 160 KUHAP diatas sangat terlihat bahwa keorisinalitasan dari keterangan saksi tersebut sangat di jaga oleh hakim pemimpin sidang. Karena Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti penting untuk membantu hakim menemukan kebenaran suatu peristiwa.

Urgensi pasal tersebut dapat terlihat pada suatu peristiwa di salah satu persidangan. Salah satu Hakim di PN Kepanjen pernah menolak seseorang dari

kerabat terdakwa yang ingin memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa. Alasan penolakan oleh hakim tersebut dikarenakan saat jalannya persidangan kerabat terdakwa tersebut sudah berada di dalam persidangan dan mengikuti jalannya persidangan dari awal.<sup>10</sup>

Menurut Penulis hal tersebut dapat di artikan sebagai pengamalan isi KUHAP terutama pasal 159 (1)<sup>11</sup> maupun 160 (1)<sup>12</sup> dalam praktek beracara di persidangan perkara pidana. Namun nyatanya apa yang penulis lihat secara langsung tersebut sangat berbeda dengan fenomena yang terjadi pada beberapa kasus besar yang marak di beritakan belakangan ini. Contohnya saja kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) maupun kasus kopi sianida yang menyeret nama Jesika Kumala Wongso. Selama bergulirnya kedua kasus tersebut terutama kasus Jesika selalu di tayangkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi swasta. Hal ini membuat kita sangat mudah mendapat informasi perkembangan kasus tersebut. Bahkan pada saat pembuktian kesaksian sidang tersebut tetap di siarkan secara langsung.

Banyak sekali hal yang dilanggar ketika sidang disiarkan secara langsung bahkan KPI Pusat mengeluarkan himbauan kepada seluruh stasiun televisi

---

<sup>10</sup>Kasus tersebut sesuai dengan pengalaman penulis saat berkesempatan mengikuti jalannya sidang pembuktian saksi kasus pembunuhan oleh terdakwa Moch.Robby di PN Kapanjen yang merupakan salah satu agenda ketika Magang di Kantor Advokat Ismail Modal Law Firm & Partners yang terjadi pada tanggal 04 Februari 2016

<sup>11</sup>Hakim Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di sidang

<sup>12</sup> saksi di panggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat umum

untuk menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan ataupun pemberitaan, tidak melakukan penghakiman, serta menghargai proses hukum yang sedang berlangsung.<sup>13</sup>

Selain itu dengan adanya sidang yang disiarkan langsung hal tersebut dapat membuat tujuan dari diadakannya pasal 159 dan 160 KUHAP tidak dapat tercapai. Karena semua orang bahkan calon saksi yang di harapkan kenetralan dan keobyektifannya dalam memberi kesaksian di persidangan bisa saja terpengaruh oipini public.

Memang dalam KUHAP tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hukuman pelanggaran pasal 159 dan 160 kuhap tersebut, sehingga dalam penerapannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menafsirkan pelaksanaan peraturan tersebut. Lalu dengan mengambil contoh permasalahan perbedaan penerapan persidangan tersebut serta tidak adanya dasar hukum yang jelas di dalam kuhap maka segala keputusan ada di tangan hakim. Namun dalam praktek hakim belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan, hal ini karena hakim yang sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Hal tersebut memang wajar terjadi namun kita juga harus memperhatikan kepastian hukum dan hubungannya terhadap hak-hak saksi bahkan hak terdakwa tersebut.

---

<sup>13</sup>Tanpa Nama, *Pemberitaan sidang Jessica Wongso berpotensi giring opini public*, terdapat dalam <http://www.bbc.com>, access 14 Februari 2017

<sup>14</sup>Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 27

Ditemukannya indikasi perbedaan antara apa yang seharusnya (dalam peraturan) dan kenyataan yang terjadi tersebutlah maka Penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam penelitian hukum yang berjudul **“ANALISA PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL 159 DAN 160 KUHAP DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA DITINJAU DARI PENCAPAIAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**

**B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana penafsiran hakim terhadap pelaksanaan pasal 159 dan 160 KUHAP dalam persidangan perkara pidana ?
2. Bagaimana pencapaian asas kepastian hukum dilihat dari berbagai penafsiran hakim terhadap penerapan suatu pasal terutama pasal 159 dan 160 KUHAP ?
3. Bagaimana implikasi dari penafsiran hakim terhadap para pihak yang bertikai dalam persidangan ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting keberadaannya dalam menentukan awal penelitian yang merupakan suatu hal yang ingin di capai, adapun tujuan penulis untuk meneliti permasalahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tafsir hakim terhadap pelaksanaan pasal 159 dan 160 KUHAP dalam persidangan perkara pidana

2. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian asas kepastian hukum dilihat dari berbagai penafsiran hakim terhadap penerapan suatu pasal terutama pasal 159 dan 160 KUHP
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari tafsir hakim terhadap para pihak yang bertikai dalam persidangan ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara tafsir hakim dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak saksi maupun terdakwa dalam persidangan perkara pidana

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai tafsir hakim agar di kemudian hari hakim lebih cermat dalam menafsirkan suatu pasal agar tidak merugikan pihak lain.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis :**

Penulisan ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam studi S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



## 2. Bagi akademisi

Penelitian ini bisa di jadikan suatu informasi yang sedikit menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum yang lebih lanjut.

## 3. Bagi Praktisi Hukum

Penulisan ini dapat di jadikan sebagai bahan evaluasi dalam khususnya untuk hakim agar lebih mempertimbangkan secara detail ketika menafsirkan suatu aturan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yaitu gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapang secara langsung ke lokasi yang diteliti, untuk mengetahui kondisi nyata permasalahan yang diangkat berdasarkan keterangan langsung dari yang bersangkutan maupun pihak terkait

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penafsiran hakim terhadap pasal 159 dan

pasal 160 KUHAP dalam persidangan pidana yang di tinjau dari pencapaian asas kepastian hukum .Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Dengan kata lain pendekatan ini melihat fakta fakta secara langsung di lokasi penelitian, serta mencari keterangan dari pihak yang bersangkutan atau yang mengetahui kejadian atau masalah yang sedang diteliti tersebut, juga melalui observasi/ pengalaman yang Penulis ketahui langsung kemudian dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.

## **2. Pemilihan Obyek Penelitian**

Penulis tertarik untuk mempelajari secara langsung berkaitan tentang penafsiran hakim dikarenakan hakim merupakan orang yang paling berpengaruh dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, hakim juga yang menentukan tercapai atau tidaknya asas kepastian dalam hukum, yang mana setiap keputusannya pun berimplikasi pada hak-hak terdakwa maupun saksi dalam persidangan. Penelitian Penulis bertempat di PN Malang dan Mojokerto. Dengan narasumber 2 hakim PN Malang, 1 Hakim PN Mojokerto serta Wakil Ketua PN Malang.

Aalasan Penulis memilih PN Malang karena sebelumnya Penulis sering sekali mengunjungi PN Malang selama menjalani mata kuliah magang sekitar setahun yang lalu. Tidak hanya berkunjung namun Penulis juga berkesempatan mengikuti jalannya persidangan yang di pimpin oleh para hakim di PN Malang tersebut. Disana Penlis menemukan perbedaan penerapan dalam praktik persidangan pidana utamanya pada pembuktian saksi.

Selain itu Penulis pun pernah bekerjasama secara langsung selama kurang lebih 3 bulan dengan beberapa Hakim di PN Malang sebagai pelatih dari delegasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam persiapan lomba *NMCC (National Moot Court Competition) Bulaksumur III<sup>15</sup>* yang di adakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta.

Banyaknya perkara yang masuk di PN Malang termasuk pula perkara pidana sehingga menurut Penulis para Hakim di PN Malang sudah sangat kompeten dan berpengalaman dalam memimpin persidangan, sehingga tepat jika Penulis mewawancarai para Hakim di PN Malang ini mengenai penerapan pasal 159 dan 160 KUHAP. Karena berbagai alasan di atas maka akhirnya Penulis memutuskan untuk memilih PN ini sebagai salah satu lokasi penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.

---

<sup>15</sup>Kompetisi praktek sidang tingkat nasional yang diadakan oleh FH UGM yang di peruntukkan seluruh FH di Indonesia, namun hanya 16 FH dari berbagai Universitas yang dapat mengikuti berdasarkan pendaftar tercepat.

Selain memilih PN Malang, Penulis juga melakukan penelitian di PN lain yaitu PN Mojokerto. Penulis sengaja memilih dua lokasi penelitian yang berbeda kota agar dapat mengetahui dan membandingkan apakah penafsiran dari Hakim di satu pengadilan dan pengadilan yang lain sama ataukah berbeda. Karena apabila Hakim tersebut bertugas di satu PN yang sama ada kemungkinan jika Hakim tersebut terbiasa melakukan kebiasaan yang sama dalam menerapkan jalannya persidangan.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum campuran maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis data Primer yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa wawancara langsung kepada beberapa hakim Pengadilan, dokumen atau risalah perundang-undangan.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Malang yaitu Bapak Rightmen Ms. Situmorang,SH.,MH dan Ibu Susilo Dyah Caturini,SH serta Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Ibu Ina Rachman,S.H.M..Hum

- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang dan peraturan mengenai tafsir hakim dan kepastian hukum
3. Berita- berita, artikel, pemaparan para ahli dari berbagai sudut pandang mengenai tafsir hakim dan asas kepastian hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diantaranya seperti :

1. Ensiklopedia Indonesia
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus hukum

**4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer atau yang paling utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan hakim pengadilan

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, berita-berita online, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis

#### **4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

a. Wawancara

Yaitu perolehan data dari hasil wawancara kepada hakim Pengadilan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang di miliki oleh pihak terkait serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan, pengumpulan berita-berita dari sumber terpercaya dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini

c. Observasi

Yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman yang secara langsung di peroleh oleh Penulis ketika mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literature atau buku-buku ataupun jurnal

d. Internet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

#### **6. Teknik analisa Data**

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni analisa data-data terkait yang di dapatkan/di kumpulkan penulis yang kemudian di kaji berdasarkan perbandingan teori dan asas-asas hukum, norma, doktrin,

dan pasal-pasal dalam undang-undang serta peraturan mengenai penafsiran hakim . Selanjutnya Penulis akan membuat kesimpulan, dasar hukum, serta solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan data yang di peroleh yang kemudian di olah serta di sajikan dalam bentuk deskriptif .

## **7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, hal ini bertujuan agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya secara garis besar aka diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. Sub bab diuraikan lebih lanjut mengenai metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Tinjauan yuridis tentang problematika tanah wakaf persyarikatan Muhammadiyah ditinjau dari aspek kepastian hukum (Studi di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis yang selanjutnya akan dianalisis secara sistematis, guna mengkaji, menyelesaikan dan menyelaraskan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada terhadap objek yang diteliti serta didukung dengan bahan hukum dan teori teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini, yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran dari penulis guna menanggapi permasalahan yang diteliti.

